

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH
IBTIDAIYAH RAUDLATUL ULUM 9
DI DESA PASAK PIANG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

ABDUL ADIM^{1*}

NIM: E1011131088

Dr.Ir.Hj.Ida Rochmawati, M.Si², Dhidik Apriyanto, SE, M.Si²

*Email: abduladimsaputra@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa implementasi standar Sarana dan Prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya berhasil. Menurut Edward III ada beberapa variabel yang menentukan keberhasilan kebijakan yaitu a) Komunikasi berupa sosialisasi yang masih lemah dari pihak pelaksana yaitu dari pihak Kemenag, b) Sumberdaya berupa jumlah Staf Pengajar beserta kemampuannya serta fasilitas fisik untuk mendukung implementasi kebijakan, c) Disposisi berupa sikap atau komitmen dari pihak pelaksana terhadap implementasi Kebijakan, d) Struktur Birokrasi berupa mekanisme kerja tersebut untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini secara praktisnya agar dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah setempat terutama terhdap pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan pencapaian tujuan implementasi kebijakan standar nasioanl pendidikan. Saran dengan sehubungan penelitian ini adalah diharapkan untuk pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta pihak sekolah agar bisa menerapkan Kebijakan Standar Nasional Pendidikan ini terutama pada kriteria Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan agar mutu pengajaran serta proses belajar mengajar bisa lebih efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Standar Nasional pendidikan

IMPLEMENTATION OF NATIONAL EDUCATION STANDARD POLICY OF RAUDLATUL ULUM 9 ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL IN PASAK PIANG VILLAGE, SUNGAI AMBAWANG SUB-DISTRICT, KUBU RAYA REGENCY

By:

ABDUL ADIM^{1*}

NIM: E1011131088

Dr.Ir.Hj.Ida Rochmawati, M.Si², Dhidik Apriyanto, SE, M.Si²

*Email: abduladimsaputra@gmail.com

3. Student Of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.
4. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze implementation of standard facilities and infrastructure as well as educators and education staff at Raudlatul Ulum 9 Islamic School in Pasak Piang Village, Sungai Ambawang Sub-District, Kubu Raya Regency is successful. According to Edward III, there are variables that determine the success of a policy which consist of a) communication in the form of socialization which is still weak by ministry of Religious Affairs, b) resources in the form of teaching staff as well as their abilities and physical facilities to support policy implementation, c) Disposition in the form of attitude and commitment from the implementing party to policy implementation, d) Bureaucracy structure in the form of work mechanism to manage the implementation of a policy. Practically, the research results are to contribute thoughts to the local government, specially to the government of Kubu Raya Regency in improving the achievement of the objectives of implementing national education standard policy. Suggestions for this research include the government of Kubu Raya Regency and the school to be able to implement National Education Standard Policy, particularly in the criteria of facilities and infrastructure standard as well as educators and education staff so the quality of teaching and the process of the teaching and learning can be more effective.

Keywords: Implementation, National Education Standard

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia dibidang pendidikan adalah menuntaskan Pendidikan Dasar 9 Tahun. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan perundangan yang ada saat ini telah menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak berumur 7 sampai dengan 15 tahun (Nur Kholis Setiawan, 2013:5)

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal Pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Standar Nasional Pendidikan itu diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi peserta didik. keberadaan peraturan pemerintah yang mengantar standar nasional pendidikan termasuk bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar ini selain sebagai syarat sekolah berstandar Nasional juga berguna untuk memperbaiki dan membentuk akhlak

peserta didik sejak dini. (PP NO 13 Th 2015)

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang semakin kompleks walaupun tidak jarang dalam implementasinya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Masalah mutu pendidikan masih menjadi kendala yang belum dapat terpecahkan. Rendahnya mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru serta mutu profesionalisme guru menjadi pekerjaan rumah pemerintah sampai saat ini. Rendahnya mutu-mutu tersebut berakar dari permasalahan yang terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan.

Tujuan dari PP. No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ialah agar terciptanya masyarakat yang berkualitas bermoral, mandiri dan kuat serta mampu bersaing dalam segala bidang terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat yang utama dalam mengembangkan sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas yaitu, warga negara yang unggul secara intelektual, anggun dalam moral dan kompeten serta produktif dalam karya memiliki komitmen yang tinggi untuk berperan dalam bidang sosial. (PP NO 13 Th 2015)

Ruang lingkup standar nasional pendidikan memiliki delapan standar yakni sebagai berikut: Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar dan standar penilaian pendidikan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah perlengkapan pembelajaran yang berkaitan dengan kriteria tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari delapan standar di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa standar yang belum terpenuhi di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang yakni: Standar sarana

dan prasarana dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya menjadi kurang maksimal dan terkendala, ini terjadi karena kurangnya bantuan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya. padahal sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki murid yang cukup banyak meskipun berada di desa terpencil dan pelosok yaitu ada 58 murid.

Dalam Standar Nasional Pendidikan ada beberapa standar yang harus dipenuhi salah satu diantaranya adalah Standar Sarana dan Prasarana yang harus ada di sebuah sekolah. Menurut PP No. 13 Tahun 2015 Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah (SMA/MA). (PP NO 13 Th 2015)

Sarana dan Prasarana untuk tingkat Sekolah Dasar (MI/SD) Menurut PP No. 13 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Ruang Kelas
2. Ruang Perpustakaan
3. Laboratorium IPA
4. Ruang Pimpinan
5. Ruang Guru
6. Tempat Beribadah
7. Ruang UKS
8. Toilet
9. Gudang
10. Ruang sirkulasi
11. Tempat bermain/berolahraga
12. Laboratorium TIK
13. Laboratorium Bahasa

Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ada 11 Sekolah Dasar (SD/ MI) yang masih aktif saat ini. Madrasah Raudlatul Ulum 9 salah satunya Penerapan Standar Nasional Pendidikan belum terealisasi dengan baik dikarenakan melihat kondisi gedung yang tidak layak, fasilitas Sarana dan Prasaran yang belum memenuhi standar seperti, tempat olahraga yang belum tersedia, tempat beribadah yang belum ada serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti buku-buku di petpustakaan yang belum lengkap serta kualifikasi

tenaga pengajar (Guru) yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan pada PP.No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas penulis menyimpulkan masih kurangnya penerapan SNP di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang, hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam mengapa Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya belum efektif.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas Standar Nasional Pendidikan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang, memiliki kendala dalam implementasinya yaitu:

1. Sarana dan Prasarana tidak memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9

Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

2. Tenaga pendidik yang belum memenuhi Kualifikasi Standar Nasional Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

C. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini dari 8 standar pendidikan yang ada, penelitian ini lebih difokuskan pada Implementasi Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang masih belum teralisasi dengan baik di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti ingin mendiskripsikan mengapa Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum

9 Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya belum efektif.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Implementasi Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang kabuapten Kubu Raya belum berhasil sebagaimana mestinya yang di atur dalam perturan pemerintah.

F. KAJIAN TEORI

Menurut Winarno (2008 :31) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya , yakni :

1. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
2. Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah

3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah- masalah politik dan sosial.

Menurut *Tilaar dan Nugroho (2008 : 138)* bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program- program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan.

Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III dalam Agustino (2012:149) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

ABDUL ADIM, NIM : E1011131088
Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik Fisip UNTAN

Untuk mencapai keberhasilan impelementasi kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik antara implementor dengan yang menjadi sasaran, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut informasi semakin jelas, maka akan tercipta konsistensi dari para implementor dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dimasyarakat.

Edward III dalam agustino:2006:157-158) mengemukakan tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komuniaksi komunikasi tersebut yaitu:

- a. Tranmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia, sumber daya material maupun sumber daya metoda. Komponen sumberdaya meliputi

jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Menurut Edward III (dalam agustino 2006:151-152) mengemukakan empat indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel sumberdaya yaitu:

a. Staff, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai, kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari pada pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat

formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

b. Fasilitas, tanpa adanya fasilitas maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu dalam pengangkatan personil pelaksana harus memiliki komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III (dalam agustino, 2006:152-153) yaitu:

Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Insentif, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu

Menurut Edward dalam III Agustino (2012:153), dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan standar operating procedures (SOP) adalah melaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan administrator atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Pada tiap harinya sesuai dengan standar yang diterapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

Dari beberapa teori yang dikemukakan maka dipilihlah teori dari Edward III sebagai landasan pijakan untuk menjelaskan masalah ini. peneliti berpendapat bahwa teori Edward III dapat mewakili dan menjawab dari analisis permasalahan dan peneliti menganggap ada yang salah dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi sehingga penerapan PP No. 15 tahun 2015 kurang maksimal

oleh karena itu peneliti beralasan ingin menggunakan teori Edward III .

Kerangka Pikir



. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi dan Teknik Observasi.

G. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak Kemenag Kabupaten Kubu Raya
2. Pihak/Kepala Sekolah MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang
3. Pengajar (Guru) di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang
4. Wali Murid MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang

Adapun penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Objek penelitian ini dipusatkan pada proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama, peneliti juga dibantu instrumen pendukung, yaitu: kamera, pedoman wawancara, *checklist*, fotocopy serta alat tulis menulis. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik.

H. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masih banyak terdapat kekurangan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa di Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ada 11 SD serta MI yang masih aktif saat ini termasuk MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang dan MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang,

penerapan Standar Nasional Pendidikan belum terealisasi dengan baik dikarenakan melihat kondisi dengan gedung yang tidak layak, fasilitas Sarana dan Prasaran yang tidak memadai seperti wc, ruangan olahraga yang sudah tersedia, tempat beribadah yang sudah memadai serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti buku-buku di petpustakaan yang belum lengkap serta kualifikasi tenaga pengajar (GURU) yang belum memenuhi Kualifikasi standar yang telah ditetapkan pada PP.No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

I. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kurang Berhasilnya Implementasi Kebijakan. Standar Nasional Pendidikan Di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan/disahkan oleh pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan yang terjadi pada masyarakat sehingga masalah yang terjadi bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan muncul beberapa hambatan atau faktor

yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal.

Faktor-faktor tersebut bisa muncul dari implementor dalam melaksanakan kebijakan bahkan juga bisa muncul dari si penerima kebijakan yaitu masyarakat yang terkadang merasa keberatan atau tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Serta bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk menjaga konsistensi dari fungsi dan tujuan tersebut, maka kurikulum, proses pembelajaran, maupun manajerial secara keseluruhan harus mengacu dan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

Menurut George C. Edward III(dalam Anggara, 2014 : 250) ada 4 faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi dari suatu kebijakan

J. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu di komunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau meyebarkannya.

Disamping itu sumber informasi yang **ABDUL ADIM**, NIM : E1011131088

Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik Fisip UNTAN

berada juga melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Jika para aktor pembuat kebijakan telah membuat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan di arahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yakni:

- 1) Tranmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi

tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi.

- 2 Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan.
- 3 Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah apapun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsistensi untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam kebijakan publik, komunikasi merupakan aspek penting bagaimana peraturan-peraturan, ketetapan atau petunjuk yang ada pada sebuah kebijakan ataupun program dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan (implementor), masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Komunikasi tidak sekedar diucapkan, namun juga mesti dipahami makna dan esensi/kandungan daripada komunikasi

tersebut. Tanpa adanya sebuah komunikasi yang baik, setiap keputusan kebijakan/program yang diimplementasikan tidak berjalan efektif dan optimal serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Untuk melihat proses komunikasi tersebut dapat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana daripada sebuah kebijakan. Selain itu, proses tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana komunikasi antar organisasi yang terjalin. Dengan komunikasi yang baik diharapkan pemahaman terhadap sebuah kebijakan menjadi lebih baik, sehingga mudah untuk diimplementasikan.

Sedangkan Kondisi yang berbeda dialami oleh MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang dimana MI tersebut belum sepenuhnya maksimal dalam penerapan Standar Nasional Pendidikan, ini dibuktikan dilapangan dengan masih kurang sarana dan prasarana dan kualifikasi guru yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah oleh karena itu penulis menganggap menarik untuk meneliti lebih jauh untuk masalah tersebut karna MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang adalah salah satu sekolah yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu penulis ingin melihat kegiatan

pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Sekolah Dasar.

PP No. 13 tahun 2015 Tentang Standar Nasional juga memiliki kriteria yang harus di penuhi oleh Tenaga pendidik Dan Kependidikan, Guru harus memiliki kualifikasi akademik yang minimum (Jenjang perguruan tinggi S1),

Kesesuaian latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan tinggi, Kesehatan jasmani dan rohani, Kemampuan merencanakan, pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran, Kompetensi mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran Kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran, Integritas kepribadian dan tindakan. Hal-hal yang terkait aspek pelanggaran norma agama, hukum dan sosial.

Terakhir adalah guru di Sekolah MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang masih ada yang belum memenuhi kualifikasi yang ditentukan, dengan data di atas tentu proses belajar mengajar kurang efektif dan kurang maksimal untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan di Sekolah MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Sehubungan dengan adanya masalah yang telah ditentukan di atas yang dihadapi tersebut membuktikan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang masih belum dapat dikatakan berhasil .

K. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor komunikasi terutama dalam konsistensi informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan

Faktor Sumberdaya yang belum cukup memadai, terutama dalam sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas, kebijakan Standar Nasional Pendidikan juga memiliki kriteria yaitu standar Sarana

dan prasarana karena hal itulah sumberdaya anggaran harus mengacu pada fasilitas yang lengkap dan memadai, karena kurangnya sumberdaya anggaran dan sumberdaya Fasilitas maka akan menghambat proses belajar mengajar, serta tidak terjaminnya mutu pendidikan yang baik.

Faktor disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, sikap para implementor haruslah jelas dan dapat diterapkan dan dijalankan dengan semestinya mengenai kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang belum efektif, hal tersebut dikarenakan pada tataran pelaksanaan itu ada beberapa implementor yang tidak betul-betul menerapkan atau melaksanakan kebijakan tersebut. ada yang mungkin hanya menerapkan dalam segi pelaksanaan itu masih harus dipertanyakan karena ada yang melaksanakan setengah-setengah dan itu yang menjadikan kendala.

Faktor Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di MI Raudlatul Ulum 9 Desa Pasak Piang belum berjalan dengan baik dan sesuai Stndar Oprasional Prosedur walaupun masih karena banyak kelemahan-kelemahan

dari pihak Dinas dan Sekolah maupun dari pemerintah setempat.

L. REFRENSI

Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Admininstrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: GAVA MEDIA
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan: Konsep, Teori dan Apikasi*. Yogyakarta: Pusat Pustaka.

- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Tahir. Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: ALFABETA
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi, ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbitan Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Penduduk (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT BUKU SERU
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pontianak
- Febriyani, Unggi. 2015. *Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan pada sekolah dasar negeri No. 68 di kecamatan pontianak barat*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pontianak.
- Sumber Instansi dan Undang-Undang:**
- Sekolah MI Raudlatul Ulum 9, Desa Pasak Piang 2018. *Data Nama-Nama dan Jumlah Guru Tahun 2017*. Kabupaten Kubu Raya
- Sekolah MI Raudlatul Ulum 9, Desa Pasak Piang 2018. *Data Sarana dan Prasarana*. Kabupaten Kubu Raya
- Undang-undang Pemerintah Indonesia No.13 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan jakarta. Penerbit Sinar Grafika
- Peraturan Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2015, Standar Nasional Pendidikan jakarta. Penerbit Sinar Grafika
- Sumber Skripsi:**
- AB Ahmad, Nasiruddin. 2010. *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 di SMAN 1 Nanga Taman*. Skripsi.

Sumber Internet:

Amin Mungamar.2013. *Delapan Standar Nasional Pendidikan*, diambil pada tanggal 31 Agustus 2019 https://www.google.co.id/search?ei=psBuWsz4EoTz8QXe7LQAw&q=delapan+standar+nasional+pendidikan&oq=delapan+&gs_l=psy-

Bnsp-Indonesia.2015. *Standar Nasional pendidikan*, di ambil pada tanggal 31 Agustus 2019 <https://www.google.co.id/search?q=standar+nasional+pendidikan&oq=standar&aqs=chrome.2.69i57j0l5.4347j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Suaidinmath.2012. *Indikator Standar Nasional pendidikan*, diambil pada tanggal 2 September 2019. https://www.google.co.id/search?ei=D8FuWr6zMsa08QXumK9A&q=indikator+8+standar+nasional+pendidikan&oq=delapan+standar+nasional+pendidikan&gs_l=psy- Pengarang Skripsi